

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui Sistem Informasi Desa milik Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pemerintah Desa Tulangan mengimplementasikan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Sementara itu, Sistem Informasi Desa baik dalam *platform online* maupun *offline* menjadi salah satu medium dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai pembangunan ditingkat desa baik yang sudah maupun sedang berjalan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan tipe penelitian deskriptif yang didukung dengan observasi langsung, studi dokumen serta hasil wawancara mendalam dengan *key person* yang menguasai informasi mengenai Sistem Informasi Desa di Kabupaten Sidoarjo. Temuan penelitian dianalisis menggunakan teori komunikasi massa dari Denis McQuail, karena dengan menggunakan teori ini, peneliti dapat melihat secara detil bagaimana Sistem Informasi Desa menjadi elemen penting dalam proses menyediakan arena dan saluran bagi pemerintahan di tingkat lokal untuk menyebarluaskan berbagai informasi dan pendapat bagi masyarakat luas. Temuan penelitian dianalisis dengan menyinggung kajian *good governance*, *e-government* serta komunikasi pembangunan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *platform* Sistem Informasi Desa milik Desa Tulangan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo dikelola oleh pemerintah desa untuk menyajikan beragam data dan informasi seputar kondisi desa sekaligus berperan dalam memenuhi pelayanan publik bagi warga Desa Tulangan. Data dan informasi yang disajikan melalui Sistem Informasi Desa dapat dengan mudah diakses oleh berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat hingga pihak pihak luar yang berkepentingan. Seiring dengan diterapkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kini kondisi serta realitas suatu desa dapat direpresentasikan melalui data, informasi serta pelayanan publik yang disajikan dalam Sistem Informasi Desa.

Kata Kunci: Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Sistem Informasi Desa, Komunikasi Massa

ABSTRACT

This research discusses implementing the Freedom of Information Act through the Village Information System of Tulangan Village, Tulangan District, Sidoarjo Regency. This research focuses on how the Tulangan Village government implements the Public Information Disclosure Law which has been mandated in Law Number 14 Year 2008. Based on Law Number 14 Year 2008, public information disclosure is a means of optimizing public oversight of the administration of the state and entity other public and everything that results in the public interest. Meanwhile, the Village Information System in both online and offline platforms has become one of the mediums in implementing the Public Information Disclosure Act. The village government has an obligation to convey information to the community about the development at the village level either already or in progress.

The study used a qualitative research method with descriptive research type which supported by direct observation, document study and in-depth interview with key person who controls information on Village Information System in Sidoarjo Regency. The outcome of this research is analysed by using mass communication theory from Denis McQuail, because by using this theory, researchers can see in detail how the Village Information System is an important element in the process of providing arenas and channels for local government to disseminate information and opinions to the wider community. The outcome are analysed by alluding to the study of good governance, e-government and development communication.

The result of this study indicate that the platform of village information system of Tulangan Village, Tulangan distric, Sidoarjo Regency is managed by the village government to present various data and information about the condition of the village as well as play a role in fulfilling public services for Tulangan Village residents. The data and information which presented through the Village Information System can be easily accessed by various stakeholders such as the central government, local government, the community, and outside parties concerned. Along with the implementation of the Public Information Disclosure Act, now the condition and reality of a village can be represented through data, information and public services presented in the Village Information System.

Keywords: *Freedom of Information Act, Village Information System, Mass Communication*